

KATEGORI

Perekonomian

SUB KATEGORI

PDRB

NAMA INDIKATOR

Pendapatan Regional dan Angka-Angka Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

TAHUN

2017

KONSEP

- **Pendapatan Regional dan Angka-Angka Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku** adalah Produk Domestik Regional Neto (PDRN) dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam daerah dan ukuran indikator ekonomi lainnya yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang berguna untuk menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.
- **Pendapatan Regional** merupakan Produk Domestik Regional Neto (PDRN) dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam daerah.
- **Angka-angka per kapita** yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi seperti : PNB, PNN atas dasar harga pasar dan PNN atas dasar harga produksi yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- **PDRB Atas Dasar Harga Berlaku** merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

RUJUKAN

-

RUMUS

-

WALI DATA

BPS Kabupaten Pematang

UKURAN

Juta/Rupiah

UNIT

Seksi Statistik Sosial

KEGUNAAN

Untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

INTERPRETASI

Pendapatan Regional dan Angka-Angka Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat dan ukuran rata-rata pendapatan perkapita yang dihitung dari pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu atas dasar harga yang berlaku.

KETERANGAN

-

SUMBER

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - Modul Konsumsi/Pengeluaran dan Pendapatan Penduduk (Tahunan).

METODOLOGI

- Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
- Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratalkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
- Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

BPS RI

DOKUMEN

DDA

